**ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**



**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi**

**Dan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ARIF RAHMAN HAKIM**

**NPM.7221800048**

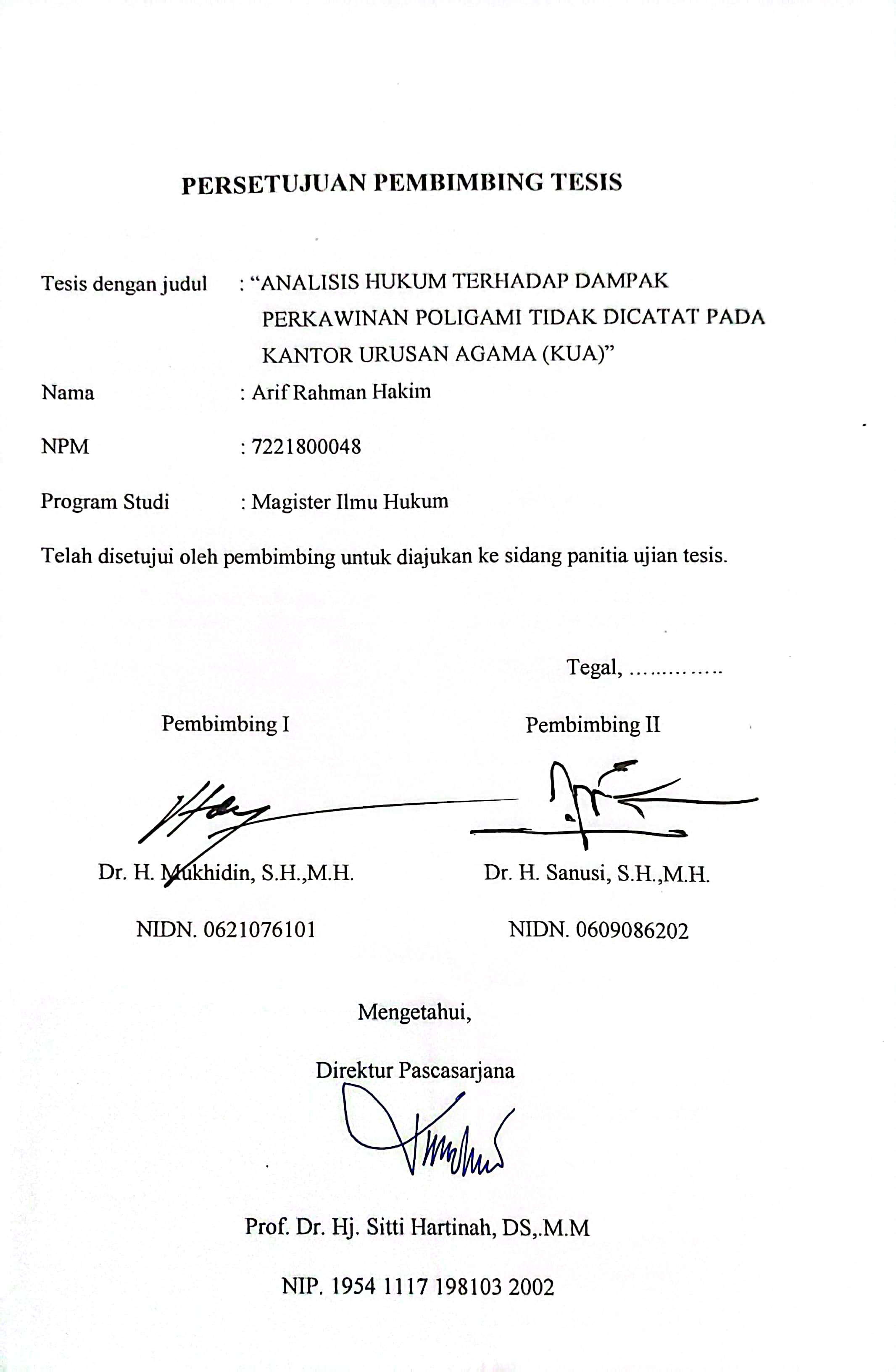
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

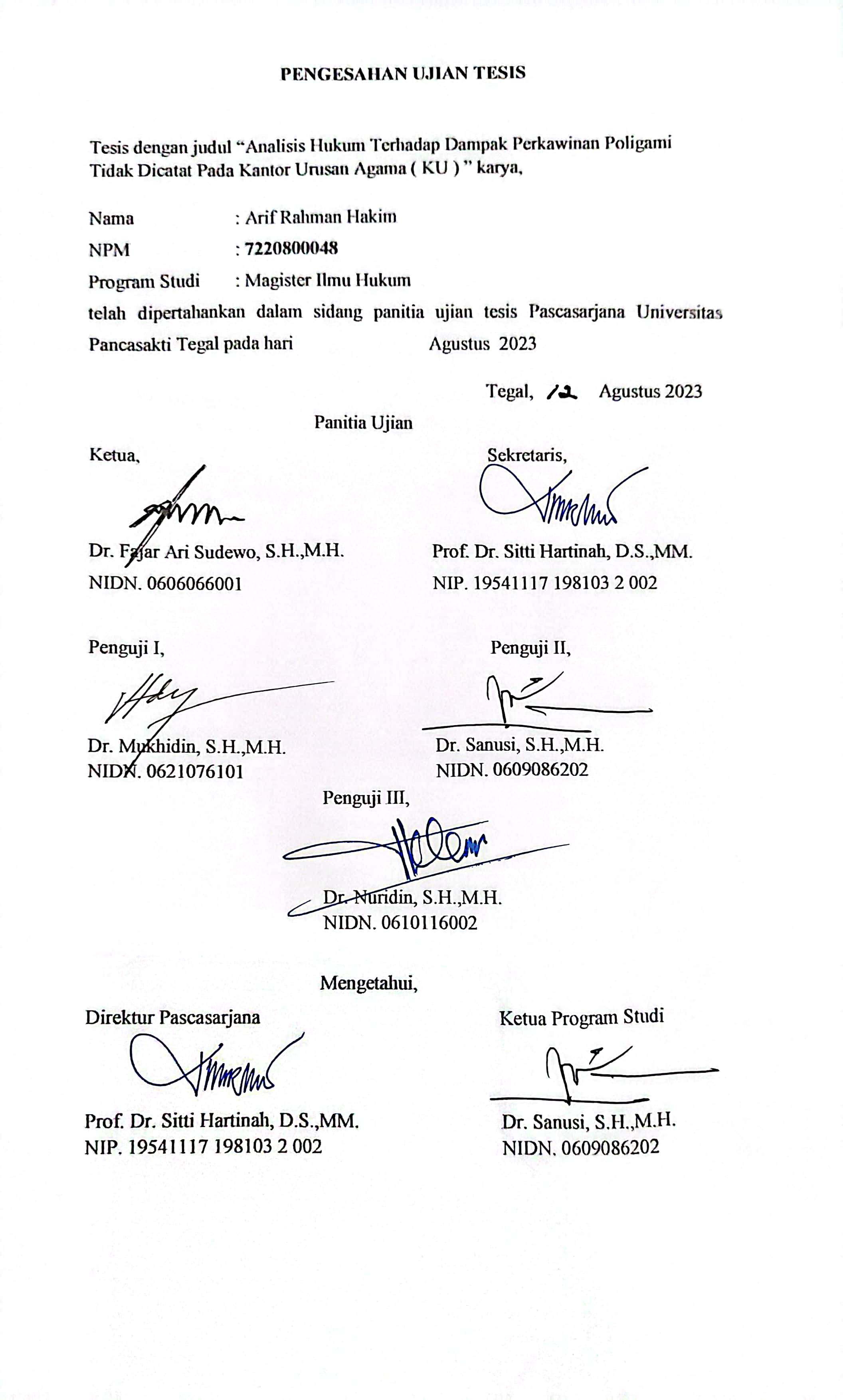
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2023**

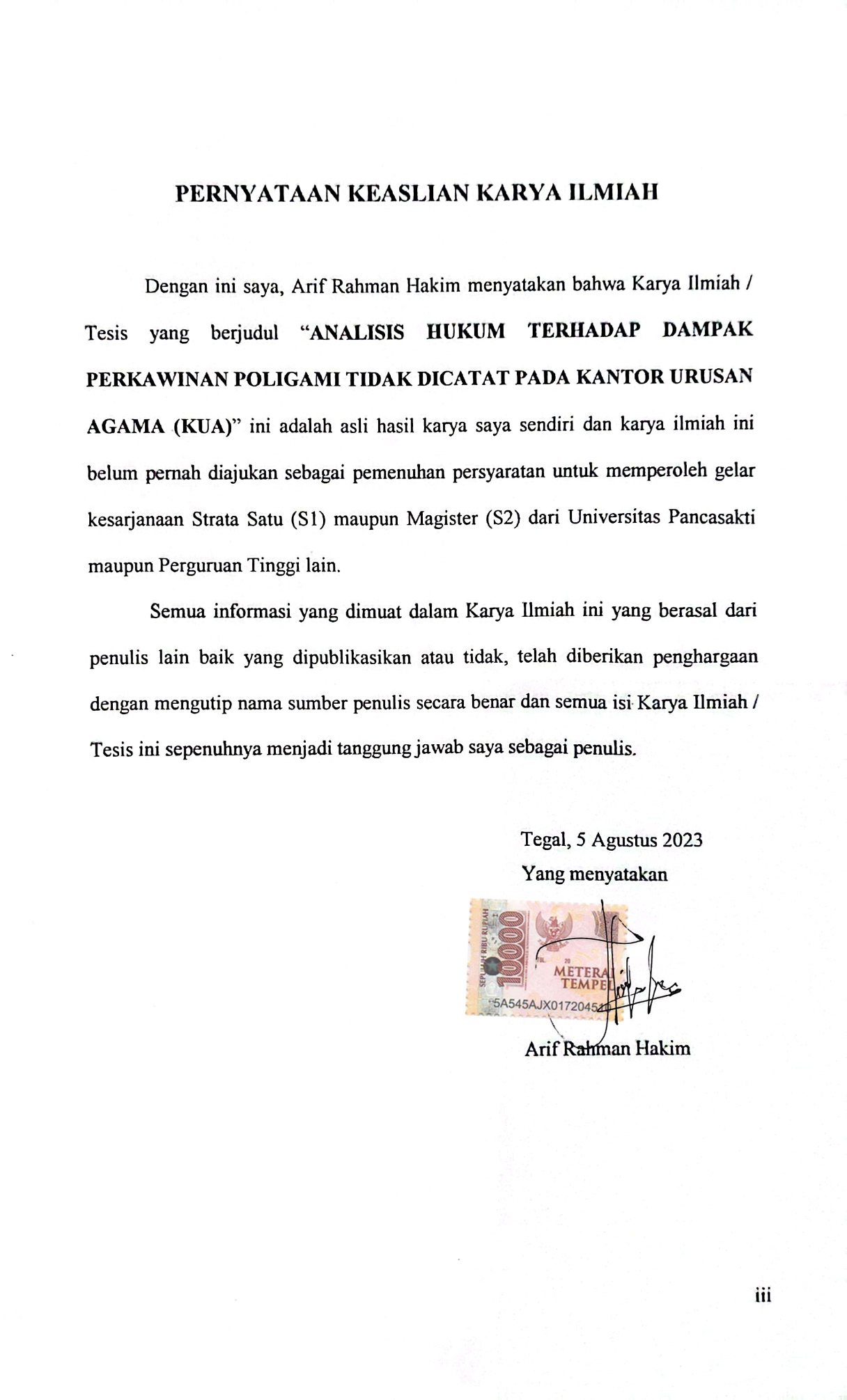
**PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**



# PENGESAHAN UJIAN TESIS



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**



**ABSTRAK**

Perkawinan poligami yang tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) adalah fenomena kompleks yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial, hukum, dan agama. Dalam praktik ini, seorang pria memiliki lebih dari satu istri tanpa melalui proses pernikahan yang sah sesuai ketentuan hukum negara. Dalam abstrak ini, kami membahas hasil penelitian terkait fenomena ini dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan poligami tanpa pencatatan, implikasi hukum bagi para pihak yang terlibat, serta pandangan masyarakat dan agama terhadap praktik ini. Pandangan masyarakat tentang perkawinan poligami tanpa pencatatan pada KUA sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan agama yang berlaku. Beberapa masyarakat mungkin menerima poligami sebagai bagian dari tradisi atau ajaran agama, sementara yang lain mungkin menolak atau menganggapnya kontroversial. Demikian pula, pandangan agama tentang poligami juga beragam, dengan beberapa agama mengakui dan mengatur praktik ini, sementara agama lain mungkin menolaknya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data dari wawancara mendalam dengan beberapa individu yang terlibat dalam perkawinan poligami tanpa pencatatan pada KUA. Selain itu, studi pustaka dan analisis kebijakan juga digunakan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang aspek-aspek yang relevan dengan fenomena ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti konteks agama dan budaya, status ekonomi, perspektif gender, dan ketidakpahaman tentang konsekuensi hukum mempengaruhi keputusan seseorang untuk menjalani poligami tanpa pencatatan resmi. Implikasi hukum dari praktik ini melibatkan ketidakjelasan status hukum para istri dan anak-anak, ketidakberlakuan perlindungan hukum, tantangan dalam proses hukum, dan stigma sosial.

***Kata Kunci : Poligami, Pernikahan Tidak Tercatat, Akibat Hukum,***

# ABSTRACT

*Polygamous marriages that are not registered at the Office of Religious Affairs (KUA) are a complex phenomenon that affects many aspects of social, legal and religious life. In this practice, a man has more than one wife without going through a legal marriage process according to state law. In this abstract, we discuss the results of research related to this phenomenon by focusing on the factors that influence the occurrence of polygamous marriages without registration, the legal implications for the parties involved, as well as the views of society and religion on this practice. Community views regarding polygamous marriages without registration at the KUA vary widely depending on the prevailing social, cultural and religious context. Some societies may accept polygamy as part of their religious traditions or teachings, while others may reject it or find it controversial. Likewise, religious views on polygamy also vary, with some religions recognizing and regulating the practice, while other religions may reject it.*

*This study used a qualitative approach by analyzing data from in-depth interviews with several individuals who were involved in polygamous marriages without registration at the KUA. Apart from that, literature studies and policy analysis are also used to gather further information about the aspects relevant to this phenomenon.*

*The results of the study show that factors such as religious and cultural context, economic status, gender perspective, and ignorance of legal consequences influence a person's decision to undergo polygamy without an official record. The legal implications of this practice involve unclear legal status of wives and children, ineffective legal protection, challenges in the legal process, and social stigma.*

***Keywords: Polygamy, Unrecorded Marriage, Legal Consequences***

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Motto**

*“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu”*

*~* ***Ali bin Abi Thalib*** *~*

*“Bila tak kunyatakan keindahan-Mu dalam kata, Kusimpan kasih-Mu dalam dada”*

*~* ***Jalaluddin Rumi ~***

*“Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam”*

*~* ***Abu Hamid Al Ghazali ~***

**Persembahan**

*Sujud dan puji syukurku hamba-Mu Allah S.W.T., Tuhan pencipta alam semesta yang telah memberikan kenikmatan yang teramat sempurna dengan segala karunia-Mu meridhai hamba-Mu merasakan rahmat dan hidayah dijalan-Mu dengan kasih sayang, kenimatan sehal wall afiat, serta rezeki yang dimudahkan. Sholawat serta salam selaluku haturkan atas kehadirat Rasulullah Muhammad S.A.W.. ucap syukur tak pernah tehingga kepada Engkau yang membawa dunia kejalan yang lebih baik dan benar kepada Allah S.W.T. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan untuk hamba-Mu ini sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.*

*Dengan sepenuh hati, yang saya hormati* ***bapak saya, H. Ahmad Mashudi****, Teladan kearifanmu telah menerangi jalan hidup saya dengan nilai-nilai Islam yang agung.* ***Ibu tercinta, Hj. Umi Nadiroh****, engkau adalah pancaran kasih sayang dan kelembutan yang telah membimbing langkah-langkah kami menuju keberkahan.* ***Istri saya, Istianah****, adalah hadiah yang tak ternilai dari Allah. Kasihmu menerangi rumah tangga kami dengan kesetiaan dan dukungan. Dalam pangkuan keluarga ini, kami berkomitmen untuk menjalankan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan. Doa kami adalah agar Allah senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada keluarga kami, menjadikan kami tauladan dalam ketaatan, kesabaran, dan rasa syukur. Dengan semangat iman, kami bersama-sama berusaha menghadapi ujian hidup dan merayakan kebahagiaan dengan penuh kesyukuran. Semoga Allah memberi kami kekuatan untuk mengikuti jejak Rasulullah dalam cinta, toleransi, dan pengertian di antara kami. Kami berdoa agar keluarga ini menjadi sumber kebaikan, rahmat, dan kedamaian bagi seluruh umat.*

*Arif Rahman Hakim*

**KATA PENGANTAR**

Dengan Mengucapkan Alhamdulillah, segla puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kesejahteraan, kesehatan, dan rahmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK DICATAT PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)”.Tujuan penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal. Penyusunan tesis ini terwujud berkat dorongan banyak pihak, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Prof. Dr. Taufiqulloh M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Prof. Dr. Hj. Sitti Hartinah, D.S.,M.M. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. H. Sanusi, S.H.,M.H. selaku Ketua program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Pancasakti Tegal yang telah membantu studi di Magister Hukum.
4. Erwin Aditya Pratama, S.H.,M.H. selaku Sekretaris program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Pancasakti Tegal yang telah membantu studi di Magister Hukum.
5. Dr. H. Mukhidin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Sanusi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, dan telah banyak meluangkan waktu dan pikiran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Pancasakti Tegal yang telah membagi ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi strata 2 ​​pada Program Penelitian Ilmu Hukum.
7. Seluruh Staff administrasi / karyawan di lingkungan Pascasarjana Pancasakti Tegal khususnya Magister Ilmu Hukum yang telah mendistribusikan layanan akademik.
8. Semua pihak yang memberikan motivasi dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan tesis ini.

Semoga segala dorongan dan bimbingan yang telah mereka bagikan menjadi amal kebajikan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak yang menggunakan tulisan ini untuk kesempurnaan tugas akhir tesis ini.

Tegal, 7 Agustus 2023

Arif Rahman Hakim

NPM. 7221800048

# DAFTAR ISI

[PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS i](#_Toc143203627)

[PENGESAHAN UJIAN TESIS ii](#_Toc143203628)

[PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii](#_Toc143203629)

[ABSTRAK iv](#_Toc143203630)

[ABSTRACT v](#_Toc143203631)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi](#_Toc143203632)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc143203633)

[DAFTAR ISI x](#_Toc143203634)

[DAFTAR TABEL xiii](#_Toc143203635)

[BAB I - PENDAHULUAN 1](#_Toc143203636)

[A. Latar Belakang Penelitian 1](#_Toc143203638)

[B. Permasalahan 6](#_Toc143203639)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc143203640)

[D. Manfaat Penelitian 7](#_Toc143203641)

[E. Originalitas Penelitian 7](#_Toc143203642)

[F. Kerangka Konseptual 13](#_Toc143203643)

[1. Kerangka Konseptual 13](#_Toc143203644)

[2. Kerangka Teoritik 15](#_Toc143203645)

[G. Metode Penelitian 17](#_Toc143203646)

[1. Jenis Penelitian 18](#_Toc143203647)

[2. Pendekatan Penelitian 18](#_Toc143203648)

[3. Spesifikasi Penelitian 19](#_Toc143203649)

[4. Sumber Data 19](#_Toc143203650)

[5. Metode Pengumpulan Data 20](#_Toc143203651)

[6. Metode Analisis Data 21](#_Toc143203652)

[H. Sistematika Penulisan 21](#_Toc143203653)

[BAB II - TINJAUAN PUSTAKA 23](#_Toc143203654)

[A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 23](#_Toc143203656)

[1. Pengertian Perkawinan 23](#_Toc143203657)

[2. Tujuan Perkawinan 28](#_Toc143203658)

[3. Syarat Perkawinan 31](#_Toc143203659)

[B. Tinjauan Umum Tentang Poligami 40](#_Toc143203660)

[1. Pengertian Poligami 40](#_Toc143203661)

[2. Syarat Poligami 42](#_Toc143203662)

[C. Tinjauan Umum Tentang Permohonan Perizinan Poligami 45](#_Toc143203663)

[1. Kedudukan Hukum Poligami 45](#_Toc143203664)

[2. Perizinan Perkawinan Poligami Pada Pengadilan 47](#_Toc143203665)

[BAB III - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51](#_Toc143203666)

[A. Akibat Hukum Yang Terjadi Dalam Perkawinan Poligami Tidak Dicatat Pada Kantor Urusan Agama (KUA). 51](#_Toc143203668)

[1. Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Tidak Tercatat 53](#_Toc143203669)

[2. Dasar Pembatalan perkawinan poligami 67](#_Toc143203670)

[B. Hukum Terhadap Anak & Istri Pada Perkawinan Poligami Tidak Dicatat Pada Kantor Urusan Agama (KUA). 73](#_Toc143203671)

[1. Akibat Hukum Terhadap Anak & Istri 75](#_Toc143203672)

[2. Pertanggjawaban Hukum Terjadinya Poligami Terhadap Istri dan Anak 88](#_Toc143203673)

[BAB IV - PENUTUP 101](#_Toc143203674)

[A. Kesimpulan 101](#_Toc143203676)

[B. Saran 102](#_Toc143203677)

[DAFTAR PUSTAKA 103](#_Toc143203678)

[LAMPIRAN 108](#_Toc143203679)

# DAFTAR TABEL

[Table 1.1 – Originalitas Penelitian Pada Penelitian Yang Serupa 8](#_Toc143203511)

[Table 3.1 – Putusan Poligami Yang Dizinkan 89](#_Toc143203512)

[Table 3.2 Putusan Poligami Yang Ditolak 93](#_Toc143203513)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan hubungan yang dilakukan oleh kedua insan yaitu anatara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat dan yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Dalam hal tata tertib perkawinan memang sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan dan tata tertib yang telah dibuat kemudian terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Contohnya di Indonesia, aturan dan tata tertih perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, zaman Sriwijaya, Majapahit, masa kolonial Belanda, hingga Indonesia merdeka. Bahkan, aturan perkawinan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan persoalan perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan yang terjadi tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara pandang yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda (Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, 2022:31).

Pada ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan:

“*Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Lebih lanjut dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 berbunyi :

“*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*.”

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad vang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI). Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari Bahasa arab yang di dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Dari pengerhan tersebut, maka inti pokok dari Perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan (Henny Wiludjeng, 2020:3).

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah warahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga; Bahkan al-Qur’an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri, teguh dan kuat (mițaqan ghaliẓan) (Khoirul Abror, 2020:1)., sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah (السكينة) artinya ketenangan dan ketenteraman (الطمأنينة والاستقرار), mawaddah (المودة) artinya kecintaan (المحبة) dan rahmah (الرحمة) artinya kasih sayang (الرقة والشفقة) 3 atau kebaikan dan kenikmatan (الخير والنعمة) (Nirwan Nazaruddin, 2020:166).

Perkawinan diambil dari Bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu zawwaja dan nakaha. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur’an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Nakaha artinya menghimpun dan zawwaja artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*zauj* dan *zaujah*) dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga (Tinuk Dwi Cahyani, 2020:1).

Tujuan pernikahan adalah untuk mem-peroleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Melalui pernikahan yang sah akan muncul keturunan yang sah dan diakui di hadapan hukum. Munculnya keturunan baru manusia hanya dapat diwujudkan jika pernikahan dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Tanpa pernikahan maka akan sulit untuk melestarikan keturunan, kalaupun dapat menurunkan manusia baru, biasanya tidak akan baik karena berasal dari hubungan yang tidak sah dan tentu juga berpengaruh terhadap kualitas manusia itu sendiri (Novita Lestari, 2018:50).

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu hal yang sakral, dan juga siftanya mengikat antara kedua belah pihak, dengan adanya hal tersebut untuk itu kedua belah pihak haruslah mencatatkan perkawinannya guna memperoleh dungandungan hukum, Pada pengaturannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang selanjutnya disebut pernikahan merupakan lembaga yang memberikan legitimasi (pengesahan) antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga.

Dalam praktiknya masih banyak sekali masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya atau yang disebut dengan “perkawinan dibawah tangan”, Nikah di bawah tangan itu = nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam dibawah tangan jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan). Istilah "Nikah tidak dicatat di KUA" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “sembunyi”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari’ah yang benar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang Nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Pernikahann harus dicatat secara resmi pada instatnsi berwenang, sebagai langkah prevenstif untuk menolak dampak *negative/madharat* atau *saddan lidz-dzari’ah* (Arsyad Said, 2018:15).

Adanya perkawinan dibawah tangan, menjadikan sebuah peluang untuk melakukan praktik poligami, Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau perkawinan, berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Dalam bahasa Arab, poligami diistilahkan dengan ta’addud al-zaujat. Menurut kamus bahasa Indonesia, poligami diartikan ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan (Khoirul Abror, 2016:29). Di Indonesia kebolehan berpoligami telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dan hanya boleh memiliki empat orang istri, berkaitan dengan hal tersebut tentunya dalam pelaksanaannya harus dicatatkan perkawinannya atas persetujuan istri, namun dengan adanya perkawinan dibawah tanggan timbulah celah hukum, yaitu melewati persyaratan perkawinan dengan tidak meminta persetujuan dari istri.

Akibatnya perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak istri, anak dan keluarga dari pihak istri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Dari hal tersebut pihak istri dapat melakukan gugatan cerai sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk suami isteri yang beragama Islam, perceraiannya mengikuti aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Hukum Terhadap Dampak Perkawinan Poligami Tidak Dicatat Pada Kantor Urusan Agama (KUA)”**.

## Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan poligami tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Bagaimana hukum terhadap anak & istri pada perkawinan poligami tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan poligami tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)?
2. Untuk menganalisa hukum terhadap anak & istri pada perkawinan poligami tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA)?

## Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk dipergunakan oleh program studi ilmu hukum dan ilmu lainnya yang berkaitan serta dapat meningkatkan kualitas pengetahuan serta citra positif program studi ilmu hukum.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian dan menjadi sarana pengembangan keilmuan yang bermanfaat pada praktik hukum perdata yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Originalitas Penelitian

Penelitian mengenai **Analisis Hukum Terhadap Dampak Perkawinan Poligami Tidak Dicatat Pada Kantor Urusan Agama (KUA)** terdapat beberapa penelitian yang serupa namun penelitian ini mempunyai perbedaan dari penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain:

Table 1.1 – Originalitas Penelitian Pada Penelitian Yang Serupa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
| 1. | Muhammad Nasrullah, 2012, *Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2009-2010 Analisis Yuridis Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. | Penelitian ini fokus pada Peristiwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan motif. Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan adalah tidak dikategorikan sebagai perbuatan hukum. | Peneliti akan fokus merumuskan pada suatu perbuatan yang tidak diakui sebagai perbuatan hukum. Suatu perkawinan dipandang sebagai perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum jika dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan, yakni harus melalui pencatatan atau terdaftar pada |
|  |  |  | Dilanjutkan……. |
|  |  |  | …….Melanjutkan |
| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
|  |  |  | Peneliti akan fokus merumuskan pada suatu perbuatan yang tidak diakui sebagai perbuatan hukum. Suatu perkawinan dipandang sebagai perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum jika dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan, yakni harus melalui pencatatan atau terdaftar pada |
|  |  |  | Dilanjutkan……. |
|  |  |  | …….Melanjutkan |
| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
|  |  |  | Kantor Urusan Agama |
| 2. | Roni HB, 2020, *Akibat Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Perspektif Teori Maslahah Dan Cedaw).* | Penelitian ini fokus pada Poligami dibawah tangan dianggap tidak sah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan pada undang-undang yaitu ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 yang terdapat kekurangan dan inkonsistensi dalam | Peneliti akan fokus merumuskan pada anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatat Kantor Urusan Agama (KUA), selain dianggap sebagai anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal |
|  |  |  | Dilanjutkan……. |
|  |  |  | …….Melanjutkan |
| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
|  |  | pasal tersebut diantaranya dikarenakan bunyi ayat (1) pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang melemahkan ayat selanjutnya yaitu pasal 2 ayat (2) dan terkesan menyuburkan poligami di bawah tangan. | Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). |
| 3. | Entus Syamsurrizal ,2016, *Perceraian Di Bawah Tangan Telaah Hukum Islam* | Penelitian ini fokus pada perceraian di bawah tangan menurut fikih atau | Peneliti akan fokus merumuskan pada akibat dari perkawinan |
|  |  |  | Dilanjutkan……. |
|  |  |  | …….Melanjutkan |
| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
|  | *Terhadap Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten*. | Hukum Islam sah hukumnya. Dalam fikih, ikrar talak oleh suami tidak mensyaratkan di depan sidang pengadilan; sedangkan menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian di bawah tangan hukumnya tidak sah, karena | poligami tidak dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) dan dikaji dari berbagai aspek atau sudut pandang sehingga masing-masing baik dari akibat hukum pada suami, istri, serta anak. |
|  |  |  | Dilanjutkan……. |
|  |  |  | …….Melanjutkan |
| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
|  |  | ikrar talak tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. |  |

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian akibat dari perkawinan poligami dibawah tangan dapat dikaji dari berbagai aspek atau sudut pandang sehingga masing-masing penelitian mempunyai perbedaan satu dengan lainnya. Demikian pula penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian lainnya namun mempunyai perbedaan untuk memperbaiki akan segala sesuatu yang dapat menjadi permasalahan.

## Kerangka Konseptual

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran secara umum atau garis besar konsep berpikir terhadap permasalahan yang diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah membahas tentang perkawinan yang tidak dicatat Kantor Urusan Agama (KUA), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai keabsahan poligami yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2, dan perkawinan dibawah tangan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, meliputi Syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:
2. *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu*
3. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*
4. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 3 ayat 2 dijelaskan mengenai poligami yang meliputi Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur dan disebutkan dalam beberapa pasal antara lain:
5. Pasal 3 ayat 2 dasar perkawinan di Indonesia adalah monogami. Adapun poligami tetap diperbolehkan dangan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1.
6. Pasal 4 ayat 1 syarat alternatif mengajukan permohonan ijin ke pengadilan. Adapun Pasal 4 ayat 2 sebagai alasan mengajukan poligami apabila istrinya tidak dapat melaksankan tugasnya, sakit yang tidak bisa disembuhkan dan apabila seorang istri tidak dapat memberikan keturunan. Pasal 5 ayat 1 sebagai syarat komulatif yaitu: apabila mendapatkan ijin dari istri atau istri-istri, mampu memenuhi kebutuhan para istri serta anak-anaknya dan dapat berlaku adil pada anggota keluarganya. Pasal 5 Ayat 2 Izin yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a diatas, jika seandainya istri/istri-istri tidak mungkin dimintai izin karena sakit atau tidak ada kabar yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
7. Perkawinan di Bawah Tangan adalah perkawinan yang tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan seperti dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

### Kerangka Teoritik

Mempelajari ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan teori hukum. Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory*, dan dalam bahasa belanda disebut *theorie*. Fred N. Kerlinger (1990:69) dalam bukunya Asas-Asas Penelitian Behavior menjelaskan bahwa teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Jan Gijssels dan Mark van Hocke memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah cabang Ilmu Hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek atas gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan baik dalam konsepsi teoritis maupun dala penjabaran praktis dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dan suatu penjelasan yang jernis atas bahan-bahan yuridis (Salim, 2010:1).

Definisi dalam teori-teori hukum diatas, maka dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum khususnya tentang Hukum Perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk, serta teori Psikologi terhadap anak dan istri pada perkawinan poligami dibawah tangan secara komprehensif baik sosiologis, psikologis dan yuridis formalnya.

Ketentuan mengenai pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa Putusnya perkawinan dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat :

1. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.
2. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Untuk pengaturan mengenai poligami dasar hukum poligami dapat kita jumpai dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

“*Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Merujuk pada dasar hukum poligami tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum poligami di Indonesia dapat dilakukan, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami*”.

Pengaturan dalam praktik poligami dibawah tangan tidak ada aturan yang mengatur pada hukum positif Indonesia apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut tergolong ilegal karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hak-hak keperdataannya tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita yang dinikahi maupun terhadap anak keturunannya.

## Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas (Ery Agus Priyono, 2004:28). Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian” (Soerjono Soekanto, 1986:5).

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2006:12) menerangkan bahwa penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau karya tulis ilmiah yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komiplasi Hukum Islam.

### Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dengan mendeskripsikan seeara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah ter- tentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu sesuai obyek penelitian ini tentang pernikahan dibawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komiplasi Hukum Islam.

### Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data (Magister Ilmu Hukum UPS, 2023:13). Untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif dalam menyusun penelitian ini, berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi tiga yang akan digunakan yaitu :

1. Data primer atau data asli yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti dan belum diolah baik secara kuantitatif maupun kualitatif oleh peneliti sebelumnya.
2. Data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa:
3. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma (kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat.
4. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan undang-undang dan hasil-hasil penelitian Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2006:9).
5. Bahan hukum tersier, disebut juga bahan rujukan, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, direktori Pengadilan, dan lain sebagainya.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini dikumpulkan melalui sumber data sekunder yang berupa dokumen atau berbagai alternalif lainnya. Studi dokumenter berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Johanes Supranto, 2003:31). Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui data sekunder yakni untuk menguji secara teoritik dalam penerapan *fast track* di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

### Metode Analisis Data

Data Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dan memahami makna terhadap persoalan persoalan yang akan diteliti. Metode analisis data deskriptif kualitatif diperoleh dengan cara menginventarisir dokumen-dokumen lalu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun dengan sistematis. Alasan mengapa penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif karena penelitian ini sangat tepat jika menggunakan analisis data kualitatif guna mendapatkan hipotesis secara utuh dan menyeluruh.

## Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini penulis membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam empat bab. dengan uraian sub babnya yaitu:

**Bab I Pendahuluan**, pada awal bab ini peneliti menyajikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, pada bab ini peneliti menguraikan kerangka teoritis yang mendasari penulisan hukum ini yaitu syarat sah perkawinan, syarat sah poligami, bentuk perkawinan dibawah tangan, serta kerangka teoritis lainnya sesuai dengan penelitian.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan berdasarkan permasalahan yang ada yaitu akibat hukum yang terjadi dalam perkawinan poligami dibawah tanggan serta dampak pada anak & istri pada perkawinan poligami dibawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Bab IV Penutup**, pada bab ini peneliti akan memberikan simpulan berdasarkan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan diuraikan dalam penulisan serta mengenai saran-saran yang diberikan oleh penulis diakhir.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

### Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah (Mamahit 2013) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun, menyantuni dan kasih mengasihi (Thalib 2015). Untuk membentuk keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling memahami antara suami istri sehingga dapat tercipta keharmonisan, ketenangan dan kasih sayang karena ketiga poin tersebut merupakan kunci dari tujuan perkawinan (Rahmat Fauzi 2014). Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk nyata dari penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Perkawinan selain masuk dalam ranah hukum administrasi juga berkaitan dengan hukum perdata. Hukum perkawinan dan hukum waris dapat menentukan sekaligus mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum perkawinan dan hukum waris memiliki peranan yang sangat

penting dalam hubungan sipil karena dapat menimbulkan suatu akibat hukum berupa hubungan hukum dengan orang tua, saudara, dan keluarga pada umumnya (Utarie, F. M., Djakaria & Sandra, E. 2015:56).

Sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqikat*) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut sakinah (Sudarsono. 2005:2).

Istilah akad nikah diartikan sebagai perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita guna membentuk keluarga bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsure agama atau Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu makna berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, karena itu perkawinan dilakukansecara beradab sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan tuhan kepada manusia (Achmad Samsudin . 2005:74).

Sigmun Freud, seorang ahli Psikologi mengatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia yang hakiki adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup ini diuraikan lebih lanjut sebagai usaha untuk melangsungkan keturunan, mempertahankan rasnya, sehingga manusia akan terus berusaha untuk beranak pinak. Salah satu jalan untuk melangsungkan keturunan adalah melalui perkawinan, karena dengan perkawinan manusia dapat melahirkan keturunan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya (Rifiyal Kabah. 2008:21).

Perkawinan adalah hubungan antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat setempat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang sudah berlaku. Bentuk perkawinan tergantung daerah dan budaya setempat. Hubungan antar pribadi tersebut diresmikan secara hukum di hadapan para petugas dan saksi serta dilanjutkan dengan pesta pernikahan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga yang terdiri dari satu ayah, seorang ibu dan anak-anak Mengatasi berbagai persoalan rumah tangga, kemampuan dalam mendidik dan menghadapi anak, memenuhi kebutuhan rumah tangga (Farid Mawardin. 2003:4). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*”

Dari bunyi pasal tersebut tidak hanya merumuskan arti perkawinan, melainkan terdapat pula tujuan perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh (1990:4) arti perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan “*tujuan*” perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 pasal l, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pertimbangannya adalah pancasila sila pertamanya, yakni ketuhanan yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Selanjutnya mengenai pengertian perkawinan dapat dikemukakan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh unluk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.
2. Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) bilaman tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara sumai istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.
3. Menurut Mahmud Yunus, perkawinan (nikah) adalah hubungan seksual (setubuh), dimana beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadis Rasulullah yang berbunyi : Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan tangannya.
4. Menurut Ibrahim Husen, perkawinan (nikah) berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
5. Menurut Imam Syafii, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* (*mathaporic*) nikah artinya hubungan seksual (Kumedi Ja’far. 2021:18).

Sementara makna nikah (kawin) dalam perspektif sosiologis bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati Bersama (T.O Ihromi. 2004:137). Sehingga dalam konteks sosiologis, bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka (Wahyono Darmabrata. 2009:128). Idris Ramulyo mengatakan bahwa perkawinan jika ikatan lahir batin tersebut tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting (Mohd. Idris Ramulyo. 1995:44).

### Tujuan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan pada umumnya didasarkan atas dasar saling menyukai, akan tetapi ada perkawinan yang meski calon mempelai sudah saling menyukai, namun perkawinannya dilaksanakan dengan tidak terang-terangan atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri atau ‘nikah sirri’, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang tidak beragama Islam). Istilah sirri berasal dari Bahasa Arab sirran, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi- sembunyi atau rahasia (Yunus, 1979: 176)

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk inilah Undang-Undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat tentang diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan. Disamping itu, syarat-syarat perkawinan ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum, mengingat perkawinan ini mempunyai akibat yang luas yaitu akan membawa akibat terhadap para pihak yang bersangkutan, keluarga para pihak, masyarakat, dan negara (Bing Waluyo. 2020:195). Asas perkawinan nasional meliputi sembilan aspek yaitu kekal, menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya, terdaftar, monogami, poligami sebagai pengecualian, tidak mengenal perkawinan poliandri, didasarkan pada sukarel atau kebebasan berkehendak, keseimbangan kedudukan suami istri, serta mempersukar perceraian. Perkawinan menurut paradigma masyarakat Indonesia dianggap sebagai suatu yang sakral dan seremonial. Stigma tersebut secara tidak langsung juga melekat pada lembaga perkawinan (Nadya Rizki Emeralda & Siti Hamidah. 2022:92).

Perkawinan memiliki sisi hukum perdata, terdapat didalamya berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan, hal ini diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Asas Sukarela. Dalam perkawinan hal ini sangat penting, baik kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan malakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali. Rasulullah menyatakan hal ini dengan tegas dibeberapa hadits.
2. Asas Persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua pihak, misalnya apabila seorang wanita akan menikah maka orang tua atau wali harus menanyakan dulu pada si wanita yang akan menikah atau dinikahkan, jika perkawinan dilangsungkan tanpa ada kesepakatan dari keduanya maka perkawinan pengadilan bisa membatalkannya.
3. Asas Bebas Memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi bahwa seseorang dapat memilih antara dua yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan oang yang tidak disukainya atau meminta dibatalkannya perkawinannya dan memilih seseorang yang dia sukai (Mohammad Daud Ali. 1006:139).

Berdasarkan hal tersebut maka administrasi yang berkaitan dengan perkawinan menjadi layanan yang sering dibutuhkan masyarakat dalam konteks pelayanan publik jika dibandingkan dengan urusan lain seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, pangan halal, ibadah sosial, kemasjidan, dan haji. Masalah sarana dan prasarana serta permasalahan yang berkaitan dengan manajemen personalia di Kantor Urusan Agama menjadi sorotan dalam hal kelembagaan yang ditinjau dari segi administrasi.

### Syarat Perkawinan

J. Satrio (1998:53) menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batih (*gezin*), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh atau mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan. Menurut pandangan yang pertama sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang telah disebut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan bunyi :

“*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Dengan demikian Pasal 2 ayat 2 yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dengan bunyi :

“*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Dengan bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa legalitas atau pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif, tetap harus dimaknai sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh setiap warga negara yang akan melaksanakan perkawinan. Pencatatan perkawinan tetap merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh kepastian hukum tentang adanya suatu perkawinan, penentuan status hukum (suami, istri, dan anak), serta untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan. Akta perkawinan yang diperoleh dari proses pencatatan perkawinan, tetap bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang isinya harus dianggap benar oleh setiap orang sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari pada hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila urusan perkawinan ini lebih banyak diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk menentukan pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan kawan hidupnya dalam berumah tangga. Pilihan ini harus benar-benar dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun (Riduan Syahrani. 2006:63). Syarat sahnya perkawinan juga dapat dilihat dari legalitas ataupun pencatatan perkawinan yang menjadi penting. Pentingnya pencatatan perkawinan adalah :

1. Agar adanya kepastian hukum dengan adanya alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan mengenai perkawinannya, sehingga memudahkannya dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga.
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan akhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan negara.
3. Agar ketentuan undang-undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*social reform*) lebih efektif.
4. Agar nilai-nilai dan norma keagamaan dan kepentigan umum lainnya sesuai dengan dasar negara Pancasila lebih dapat ditegakkan (Saidus Syahar. 1982:108).

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tdak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (Akhmad Munawar. 2015:25).

Dalam Undang-Undang Perkawinan wajib dipenuhinya persyaratan sebagai syarat sahnya perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Materiil (syarat inti / internal)

Suatu persyaratan yang berkaitan denan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materil absolut dan relatif :

1. Persyaratan Materil absolut meliputi pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin, hal ini dapat di temui dalam BW yaitu pasal 27. Usia harus sesuai ketentuan yang ada. Wanita juga tidak dibolehkan kawin lagi ketika belum melewati 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui juga dalam BW yaitu pada 34. BW pasal 28 juga menyebutkan diperlukannya juga izin pihak ketiga.
2. Syarat materil relatif yaitu tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat juga dalam pasal 30 dan 31 BW. Tidak ada juga yang pernah melakukan overspel tertera pada pasal 32 BW. Serta tidak juga pernah melakukan reparatie huwelijk untuk yang ketiga kalinya.
3. Persyaratan Formil (lahir/eksternal)

BW pasal 50 s/d 70 menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa saja. Pada BW pasal 50 s/d 51 dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan dulu pada Pejabat Catatan Sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian Undang-Undang Perkawinan menjelaskan, ada persyaratan yang harus dilakukan agar bisa melakukan suatu perkawinan, diantaranya:

1. Harus didasari persetujuan kedua calon.
2. Dilakukan dengan memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah, bagi yang belum bisa mendapat toleransi.
3. Izin nikah diperkenankan juga diperoleh dari salah satu orang tua yang masih hidup.
4. Jika orang tua mempelai sudah meninggal semua, izin bisa diperoleh dari walinya atau yang memelihara atau keluarganya dari garis keturunan keatas.

Adapun ketika ada perbedaan pendapat antar setiap orang yang disebutkan diatas membuat diperbolehkannya pengadilan untuk memberi izin setelah terlebih dulu mendengarkan setiap orang.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku (Mohd. Idris Ramulyo. 2004:55). Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan ini :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri (Ahmad Rafiq. 2000:57).

Berdasarkan 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan diatas maka perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku, secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan akibatnya pihak isteri, anak dan keluarga dari pihak isteri lainnya tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami. Namun dalam kenyataannya kawin dibawah tangan atau kawin sirri banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Tujuan dari diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah tertib masyarakat dibidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terpola dalam suatu sistem kaedah dan oleh Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan orang lain terlindungi dan fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat (Samson Rahman . 2007:11).

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyaarkat dan juag institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda (Kutbuddin Aibak. 2209:39).

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga. Persoalannya adalah mengenai penafsiran untuk memahami maksud dan isi dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai sahnya perkawinan dan mengingat perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi karena sebuah perjanjian di lapangan hukum keluarga, maka permasalahannya dapat ditentukan bagaimana sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan harapan dapat diperoleh kejelasan mengenai penafsiran yang tepat mengenai sahnya perkawinan sehingga kerancuan dalam pemahaman tentang sahnya perkawinan dapat diselesaikan (Trusto Subekti. 2010:332). Menurut Subekti bahwa ketentuan suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUHPerdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dapat dikesampingkan, sehingga suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat menurut KUHPerdata dan telah dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan, merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum meskipun bertentangan dengan peraturan agama (Subekti. 1994:34).

## Tinjauan Umum Tentang Poligami

### Pengertian Poligami

Kata-kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri kata *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami adalah seseorang yang mempunyai beberapa orang istri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta‟diiduzzaujaat* (berbilangan pasangan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia poligami disebut dengan permaduan (Rahmat Hakim. 2002:113). Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga hak-hak keperdataannya tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita yang dinikahi maupun bagi anak yang dilahirkannya kelak.

Abdul Wahab Khalaf (1990:60) memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut. Soemiyati (1999:193) menjelaskan pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
2. *Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.*

Dari perspektif Hukum Islam memang memperbolehkan poligami, namun hukum Islam tidak mengatur tata cara secara administratif dalam pelaksanaan poligami. Agar poligami dapat dilaksanakan tertib secara hukum pemerintah, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka hukum Islam di Indonesia mengatur mengenai proses poligami tersebut. Menurut ajaran Islam, perkawinan poligami diperbolehkan atas dasar Q. S. An-Nisa’: 3, yaitu:

“*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*.”

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan adanya kebolehan berpoligami sampai batasan 4 (empat) orang istri. Selanjutnya ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa kebolehan tersebut berlaku dengan syarat yakni “berlaku adil kepada mereka (istri dan anak)”. Makna adil ialah adil dalam melayani istri, memberikan nafkah istri dan anak, tempat tinggal istri dan anak, pakaian, giliran dalam hal lahiriyah. Namun jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja (monogami). Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

### Syarat Poligami

Syarat harus berbuat adil bagi pria yang berpoligami merupakan suatu yang tidak akan terlaksana, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, karena ketidakmungkinan berbuat adil ini telah disebutkan dalam surat An Nisa: 129 yang berbunyi:

“*Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kau sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memlihara diri dari kecurungan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang*”

Dari bunyi Surat An Nisa: 129 di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang berlaku adil secara mutlak hanya Allah. Mengingat syarat harus berbuat adil, penulis mengikuti pendapat yang lazim tentang adil, yaitu keadilan secara lahiriah. Selanjutnya untuk menjaga agara poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar “*maslahat nurasalah*” negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutu sama sekali pintu poligami (Basyir 2008).

Atas dasar hal di atas, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Indonesia tanpa memandang mereka berasal dari golongan penduduk apa dan mereka berasal dari daerah mana. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi warganegara Indonesia yang sebelumnya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tunduk kepada KUHPerdata (L. A. S 2015). Syarat poligami termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini. Seorang suami yang diberi izin utuk menikah lebih dari satu harus tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidakbahagian kehidupan rumah tangga. Hal ini tergambar dalam pasal 4, yaitu :

1. Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
3. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri.
4. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
5. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Fatimah Zuhrah. 2017:32).

Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh sayrat-sayarat yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian, bahwa saumi mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri selam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Persetujuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dipertegas oleh Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

“*ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan*”,

Sedangakan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja.
2. Surat keterangan pajak penghasilan.
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu ada atau tidak jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

## Tinjauan Umum Tentang Permohonan Perizinan Poligami

### Kedudukan Hukum Poligami

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendefinisikan Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polusyang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kataini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempu- nyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari’atkan oleh Islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syarat- syarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu:

1. Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Q.S An-Nisa : 3.
2. Sanggup berbuat adil kepada para isteri, seperti masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah.
3. Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengum- pulkan isteri dengan saudaranya atau dengan bibinya.
4. Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertambahnya isteri, maksudnya bagi se- orang suami yang ingin menikah dengan seorang wanita harus yang sudah mampu, jika belum mampu haruslah menahan dulu (puasa).
5. Persetujuan dari isteri, hal ini sesuai dengan posisi suami dan isteri (Djubaidah. 2012:12).

Berdasarkan hal tersebut maka dianggap satu kesatuan dalam keluarga, Apapun yang dilakukan oleh suami dimintakan izin kepada isteri, apalagi masalah ingin beristeri lagi. Persetujuan ini sangat penting demi keutuhan dan kelangsungan hidup berkeluarga.

### Perizinan Perkawinan Poligami Pada Pengadilan

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

“*Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (2) mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*”.

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (2) huruf I yang berbunyi :

“*Izin dari Pengadilan bagi seorang sumai yang hendak beristeri lebih dari seorang*”.

Perkawinan Poligami dalam pelaksanaan pernikahannya sama dengan pernikahan pertama kali, bedanya poligami harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, proses selanjutnya yang dilakukan pelaku poligami adalah sebagai berikut:

1. Datang ke kelurahan atau Desa dengan membawa penetapan izin poligami dan meminta surat- surat untuk pernikahan berupa surat keterangan, model N1, N2, N3 dam N4.
2. Laporan Pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Ijab Qabul.

Pelaksanaan Permohonan Izin Poligami pada Pengadilan Agama telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang suami yang akan mempunyai isteri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama setempat. Hakim Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan tersebut jika alasan-alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan permohonan poligami terpenuhi. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tapi dalam hal ini yang dipertanyakan adalah alasan-alasan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan poligami itu telah sesuai dengan keadaan isteri yang sebenarnya.

Terdapat Tata Cara Pelaksanaan Izin Perkawinan Poligami pada Pengadilan Agama. Untuk pemberian izin berpoligami dari Pengadilan Agama terhadap sumai yang akan berpoligami dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Seorang suami yang akan melakukan poligami terlebih dahulu harus mendaftarkan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama yaitu dengan cara memasukkan surat permohonan izin berpoligami yang ditulis sendiri sebagaimana yang di atur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disertai dengan surat keterangan enghasilan dari bendahara tempat bekerja dan surat pernyataan sanggup untuk berlaku adil serta membayar panjar biaya perkara.
2. Kemudian Ketua Pengadilan menentukan majelisnya yaitu siap hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian ketua majelis hakim menentukan hari sidang. Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan poligami ini dilakukan hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan.
3. Untuk melakukan pemeriksaan maka pengadilan agama melakukan pemanggilan kepada para pihak melallui juru sita dengan mengirimkan surat berkedudukan sebagai “Pemohon” dan isteri sebagai “Termohon”. Poligami ini termasuk kedalam golongan perkara yang bersifat *volunteer* adalah suatu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak ada sengketa sedangkan perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak ada sengketa, sedangkan perkara yang sifatnya kontensius adalah di dalam persidangan itu ada dua pihak atau lebih yang bersengketa, jadi adanya gugatan.
4. Dalam persidangan hakim akan menanyakan alasan permohonan poligami dan menanyakan kesediaan isteri untuk di poligami atau di madu, jika ia hadir di persidangan. Pada tahap pembuktian hakim juga akan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan poligami tersebut. Bukti-bukti ini dapat berupa surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami, surat nikah dan bisa juga dengan bukti saksi. Bukti yang diperlukan dalam persidangan sesuai dengan alasan pengajuan permohonan poligami, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusannya.
5. Setelah itu hakim akan membuat kesimpulan dan menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan atau menolak permohonan poligami. Panggilan ke alamat yang tercantum dalam surat permohonan yang mana dalam hal ini suami.